

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI GORONTALO 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
 - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Gorontalo 2014

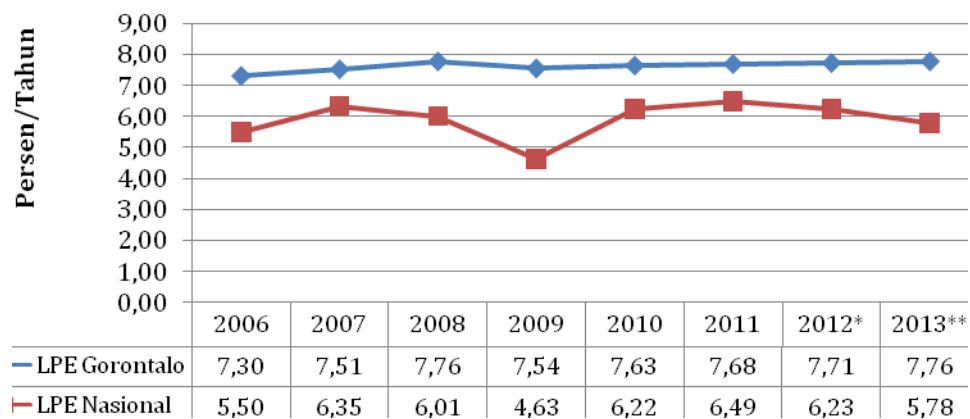
SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Peran strategis Provinsi Gorontalo dalam mendukung peran Sulawesi di tingkat nasional sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nikel semakin berkembang. Dalam hal ini Provinsi Gorontalo juga ditetapkan sebagai simpul pertanian pangan bersama dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Kinerja perekonomian Gorontalo periode 2006-2013 terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 7,61 persen, lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,90 persen pada periode yang sama (Gambar 1). Kontribusi Provinsi Gorontalo terhadap pembentukan PDRB Pulau Sulawesi adalah sebesar 3,25 persen, sementara itu kontribusi terhadap pembentukan PDB Nasional sebesar 0,15 persen. Sumbangan ekonomi Gorontalo terhadap pembentukan PDRB Sulawesi tergolong paling kecil di antara provinsi lain di pulau tersebut sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik untuk meningkatkan PDRB provinsi ini.

Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000

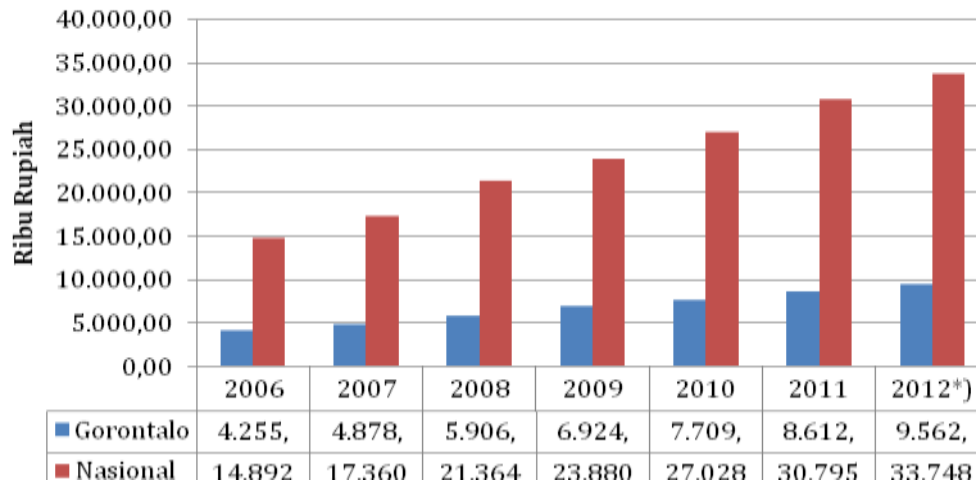


Sumber: BPS, 2013

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di Gorontalo selama kurun waktu 2006-2012 cenderung meningkat walaupun masih berada di bawah angka nasional. Hal ini menunjukkan kesejahteraan di Provinsi Gorontalo juga meningkat meskipun relatif tidak baik secara nasional. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita Gorontalo dan PDB nasional sebesar 28,59 persen, maka pada tahun 2012 rasionya menurun menjadi 28,37 (Gambar 2). Apabila pertumbuhan penduduk antar

provinsi tidak terlalu berbeda jauh, ini menunjukkan kinerja rata-rata provinsi lain berkembang lebih pesat dari Gorontalo.

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

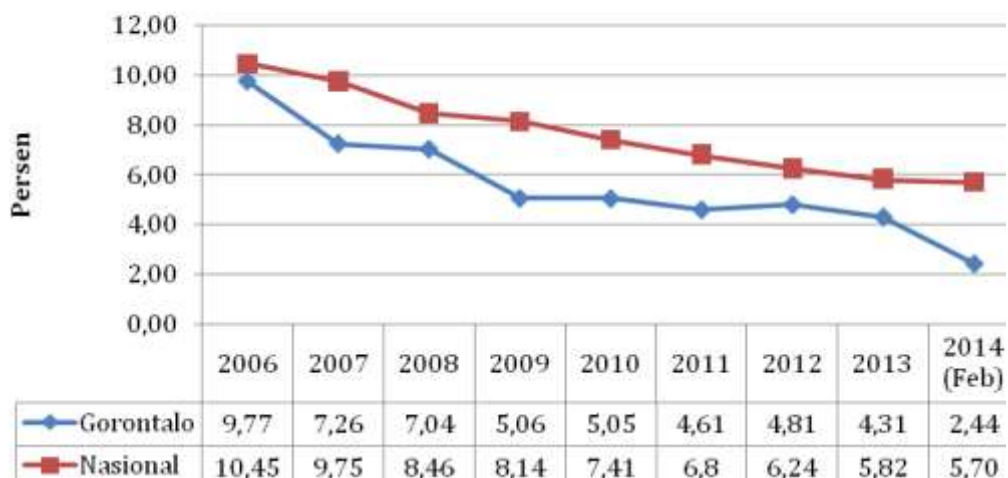


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo selama 2006-2013 berkurang sebesar 5,46 persen. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun. TPT Gorontalo pada periode 2006-2012 termasuk rendah bila dibandingkan dengan TPT nasional (Gambar 3). Tingkat pengangguran yang rendah di tengah pendapatan per kapita yang rendah mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di daerah tersebut.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

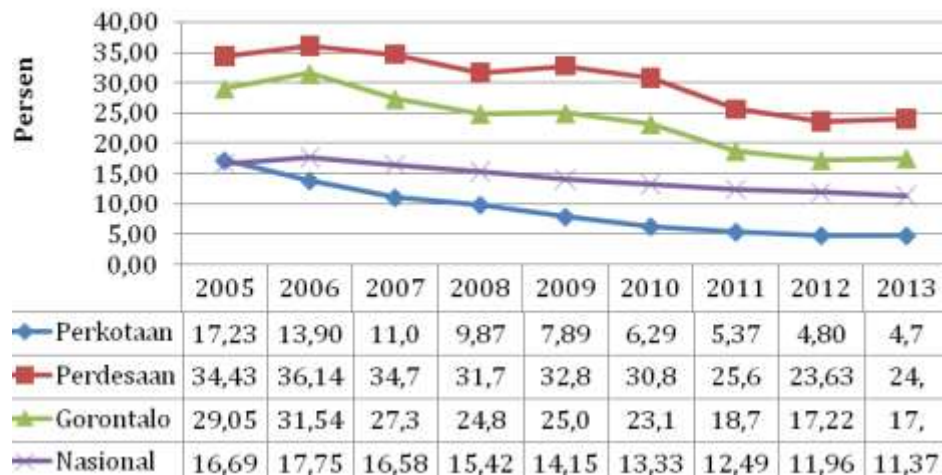


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo memberikan dampak positif terhadap penurunan kemiskinan di wilayah ini. Selama kurun waktu 2005-2013 persentase penduduk miskin cenderung menurun, baik di perkotaan maupun di perdesaan (Gambar 4). Secara nasional persentase penduduk miskin di Gorontalo tergolong tinggi. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di nasional sudah mencapai 11,37 persen, namun tingkat kemiskinan di Gorontalo masih sebesar 17,50 persen dengan 24 persen kemiskinan berada di perdesaan. Karakteristik penduduk miskin di Provinsi Gorontalo didominasi oleh masyarakat yang tinggal di perdesaan dan berprofesi sebagai petani, dengan tingkat pendidikan rendah. Tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan karena kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, maupun infrastruktur lain yang menyebabkan rendahnya pendidikan di perdesaan. Keterbatasan infrastruktur di perdesaan juga menyebabkan rendahnya minat investor untuk berinvestasi di perdesaan sehingga memaksa penduduk desa menggantungkan hidupnya pada pertanian yang kurang berkembang.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2014

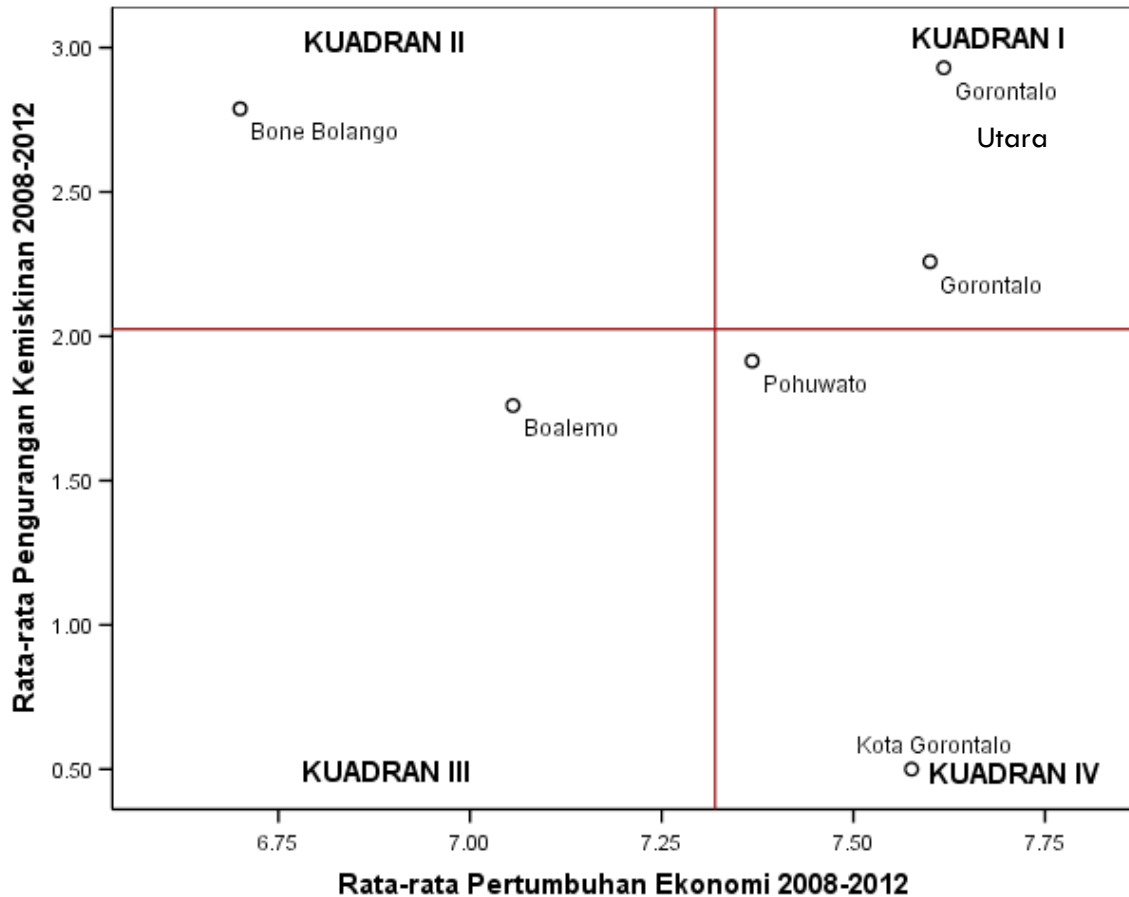
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertama, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara berada di kuadran I, termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kedua, Kabupaten Bone Bolango terletak di kuadran II, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Boalemo terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-*

poor). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Keempat, Kabupaten Pakuwato dan Kota Gorontalo terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Gorontalo terletak di kuadran I, termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

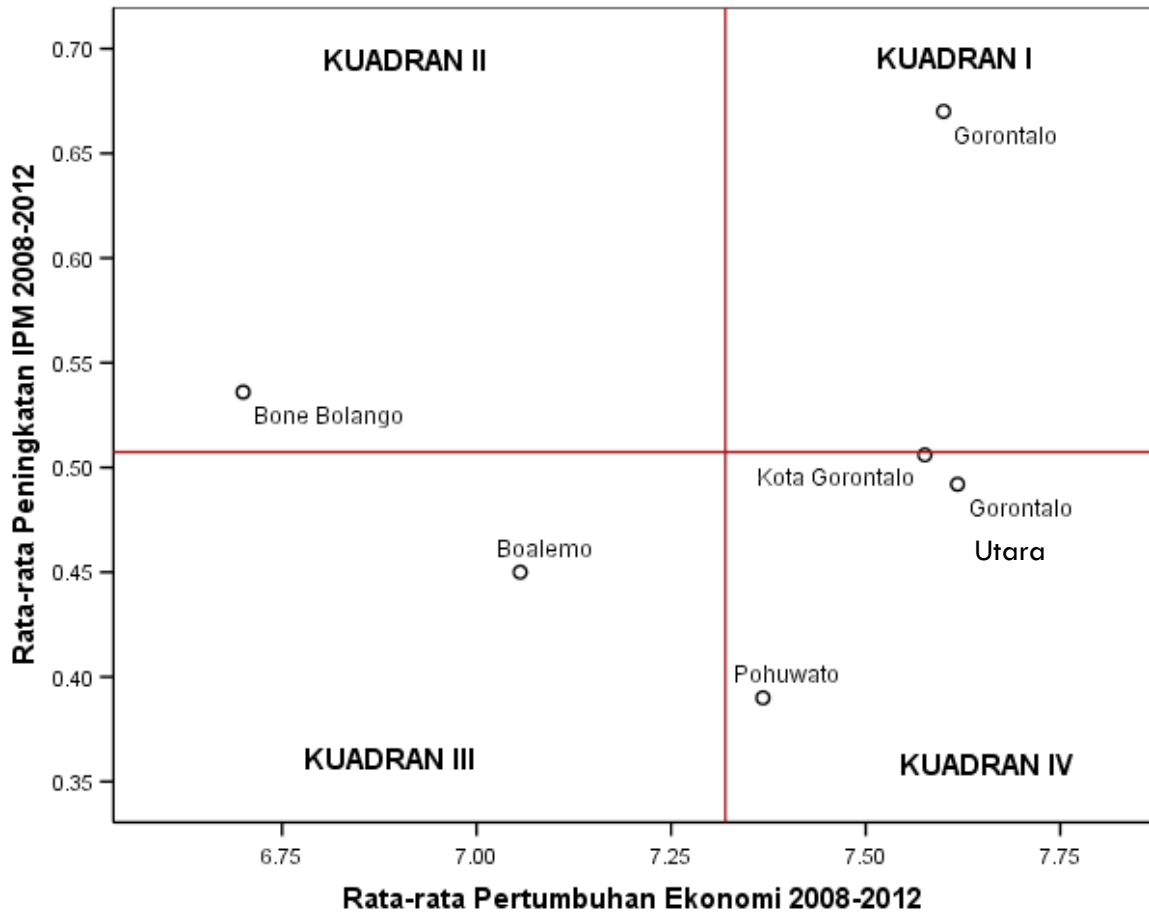
Kedua, Kabupaten Bone Bolango terletak di kuadran II, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Boalemo terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Keempat, Kabupaten Gorontalo, Pohuwato dan Kota Gorontalo terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah

menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

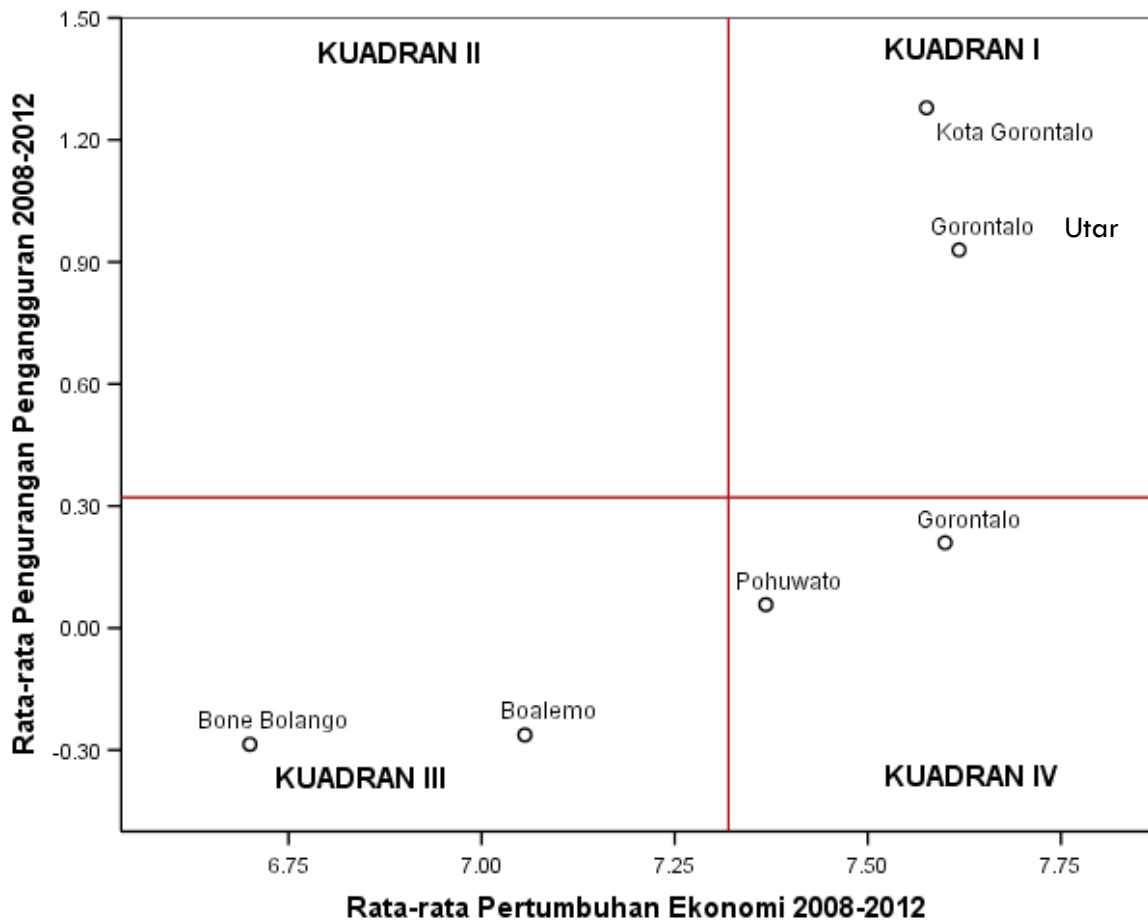
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kedua, tidak ada kabupaten/ kota yang terletak di kuadran II, yaitu kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Pada kuadran ini perluasan

lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Ketiga, Kabupaten Bone Bolango dan Boalemo terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

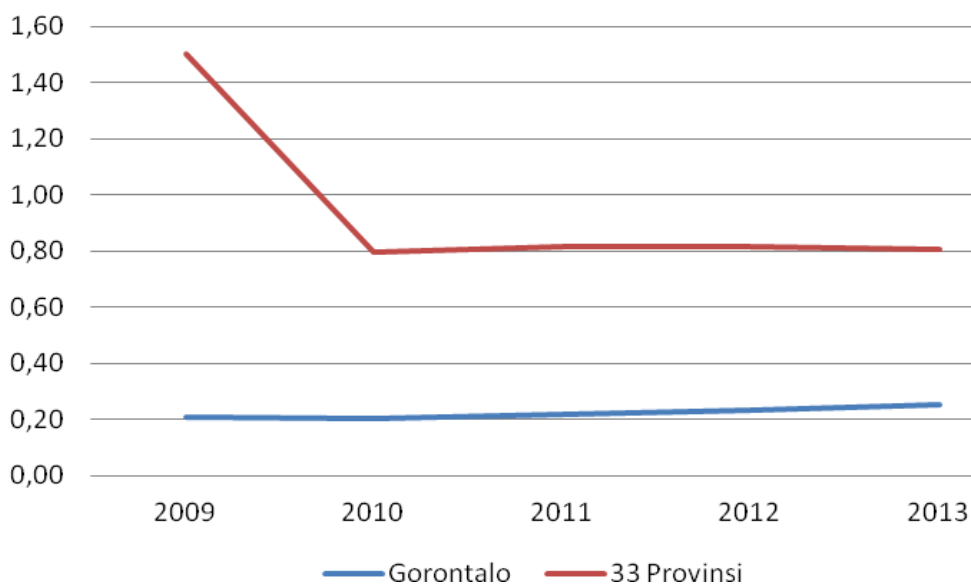
Keempat, Kabupaten Gorontalo dan Pohuwoto terletak di kwadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah

mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Gorontalo yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata kesenjangan nasional (Gambar 8). Keberadaan sumber daya alam dan jenis kegiatan perekonomian menjadi salah satu penyebab kesenjangan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo cukup tinggi walaupun distribusi pendapatannya kurang merata di seluruh kabupaten/ kota di provinsi ini, terlihat dari terdapatnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Kabupaten Pahuwato memiliki nilai PDRB per kapita tertinggi di Provinsi Gorontalo selama periode 2007-2012, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara memiliki pendapatan per kapita terendah dalam periode yang sama. Perekonomian antar kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo relatif tidak merata dalam struktur dan pola ekonominya karena perbedaan potensi dan kemampuan dari masing-masing wilayah yang memacu pertumbuhan ekonomi.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Boalemo	4.431	5.121	5.658	6.111	6.713	7.234
Gorontalo	3.511	4.493	5.923	6.733	7.399	8.165
Pahuwato	6.065	7.330	8.284	9.314	10.679	12.196
Bone Bolango	4.570	5.271	5.944	6.528	7.030	7.502
Gorontalo Utara	3.032	3.740	4.295	4.316	4.845	5.510
Kota Gorontalo	5.910	6.814	7.620	8.804	9.966	11.314
GORONTALO	4.878	5.907	6.925	7.709	8.612	9.563

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Pertanian

Struktur perekonomian Gorontalo didominasi oleh sektor pertanian, diikuti jasa-jasa, dan perdagangan (Tabel 2). Peranan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih rendah. Industri pengolahan sendiri hanya berkontribusi sebesar 5 persen, sementara dukungan sektor utilitas untuk industri berkontribusi sangat kecil. Sektor jasa-jasa sebagai sektor tersier mulai mendominasi perekonomian Gorontalo sejak tahun 2008 dan terus meningkat hingga tahun 2013. Hal ini menjadi indikator perkembangan wilayah sebagai pusat pelayanan. Sektor pertanian yang mendapatkan prioritas pengembangan di wilayah ini adalah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan memiliki pasar luas, sedangkan pola kegiatan pertanian banyak dilakukan di perdesaan dengan keterbatasan modal, penyediaan bibit unggul, pupuk, kualitas SDM yang rendah, serta kualitas produksi dan pemasaran yang rendah. Walaupun sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Gorontalo, namun laju pertumbuhan sektor ini termasuk rendah apabila dibandingkan dengan sektor lain. Produktivitas pertanian padi di Provinsi Gorontalo juga tinggi namun tingkat produksinya juga rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	28,00	27,17
2.	Pertambangan	1,13	1,08
3.	Industri Pengolahan	5,11	8,06
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,53	0,58
5.	Konstruksi	7,09	9,33
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	11,60	15,64
7.	Angkutan, Telekomunikasi	9,13	10,97
8.	Keuangan	11,46	9,10
9.	Jasa-jasa	25,95	18,06
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Berdasarkan analisis sektor basis terlihat kuatnya sektor pertanian dalam perekonomian. Sektor basis perekonomian di Gorontalo antara lain pertanian, konstruksi, dan jasa-jasa (Tabel 3). Seluruh subsektor pertanian memiliki nilai LQ lebih besar dari satu. Hal ini menunjukkan Gorontalo memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor tersebut. Sebaliknya semua sektor di kelompok industri pengolahan memiliki nilai LQ kurang dari satu.

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Perekonomian Gorontalo Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	2,25	2,18	2,17	2,20	2,21
a. Tanaman Bahan Makanan	2,19	2,02	2,08	2,16	2,19
b. Tanaman Perkebunan	2,82	2,82	2,47	2,41	2,26
c. Peternakan	2,54	2,63	2,72	2,78	2,84
d. Kehutanan	1,25	1,24	1,33	1,40	1,42
e. Perikanan	1,98	2,04	2,02	2,00	1,99
2. Pertambangan dan Pengalihan	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan Bukan Migas	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02
c. Pengalihan	1,00	1,06	1,13	1,10	1,07
3. Industri Pengolahan	0,30	0,29	0,30	0,30	0,31
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,77	0,70	0,75	0,75	0,73
a. Listrik	0,93	0,92	0,93	0,92	0,90
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	1,19	1,12	1,39	1,33	1,28
5. Konstruksi	1,28	1,34	1,38	1,41	1,41
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0,78	0,82	0,82	0,83	0,84
a. Perdagangan Besar dan Eceran	0,78	0,82	0,82	0,83	0,84
b. Hotel	0,23	0,21	0,24	0,22	0,20
c. Restoran	0,97	0,97	1,00	1,02	1,04
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,29	1,18	1,13	1,10	1,07
a. Pengangkutan	2,50	2,48	2,52	2,53	2,55
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	3,21	3,26	3,42	3,52	3,58
3). Angkutan Laut	1,22	0,91	0,90	0,86	0,89
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,94	0,87	0,80	0,76	0,71
5). Angkutan Udara	3,55	3,48	3,20	2,97	2,92
6). Jasa Penunjang Angkutan	1,35	1,36	1,35	1,33	1,35
b. Komunikasi	0,30	0,26	0,23	0,22	0,21

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,89	0,90	0,92	0,92	0,93
a. Bank	0,91	0,94	0,95	0,97	0,96
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	1,25	1,20	1,23	1,25	1,25
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	1,30	1,32	1,36	1,37	1,39
e. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
9. Jasa-jasa	2,07	2,08	2,07	2,01	1,98
a. Pemerintahan Umum	3,57	3,67	3,70	3,63	3,68
b. Swasta	0,90	0,87	0,86	0,83	0,81
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	1,64	1,60	1,58	1,53	1,54
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,99	0,98	0,98	0,90	0,89
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,60	0,58	0,57	0,55	0,53

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Untuk mengurangi ketergantungan pada kegiatan ekonomi primer, sektor industri pengolahan perlu dikembangkan. Hal ini dikarenakan sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan, yang ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis. Ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat, permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Sektor industri pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja. Selama periode 2011-2014 sektor industri pengolahan dan jasa-jasa mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan meskipun memberikan kontribusi kecil pada perekonomian (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian yang kurang produktif.

Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	194.987	169.345	(25.642)
2	Pertambangan	6.957	35.189	28.232
3	Industri Pengolahan	41.393	19.196	(22.197)
4	Listrik, Gas, Air	1.059	1.261	202
5	Bangunan	18.864	23.241	4.377
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	87.167	104.106	16.939
7	Angkutan & Telekomunikasi	25.350	42.426	17.076
8	Keuangan	3.910	8.732	4.822
9	Jasa-Jasa	80.668	104.443	23.775
	Total	460.355	507.939	47.584

Sumber: BPS, 2014

2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama 2006-2013 adalah konsumsi rumah tangga (Tabel 5). Peran investasi (PMTB) yang penting untuk pertumbuhan daerah hanya berkontribusi sebesar 21 persen, jauh lebih kecil dari sektor konsumsi rumah tangga. Investasi memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi terutama dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Provinsi Gorontalo hanya memperoleh porsi kecil dari investasi swasta. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi bagi calon investor mengenai potensi wilayah, meliputi komoditas unggulan, lokasi sebaran, potensi komoditas, cadangan potensi sumber daya alam yang dimiliki, ketersediaan lahan, infrastruktur penunjang, dan skala investasi di daerah tersebut.

Tabel 5
PDRB Provinsi Gorontalo Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	58,21	67,92
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	1,19	1,05
3.	Konsumsi Pemerintah	29,81	43,36
4.	PMTB	20,73	33,67
5.	Perubahan Stok	30,07	-9,45
6.	Ekspor	5,85	8,38
7.	Impor	45,86	44,94
	Total	100,00	100,00

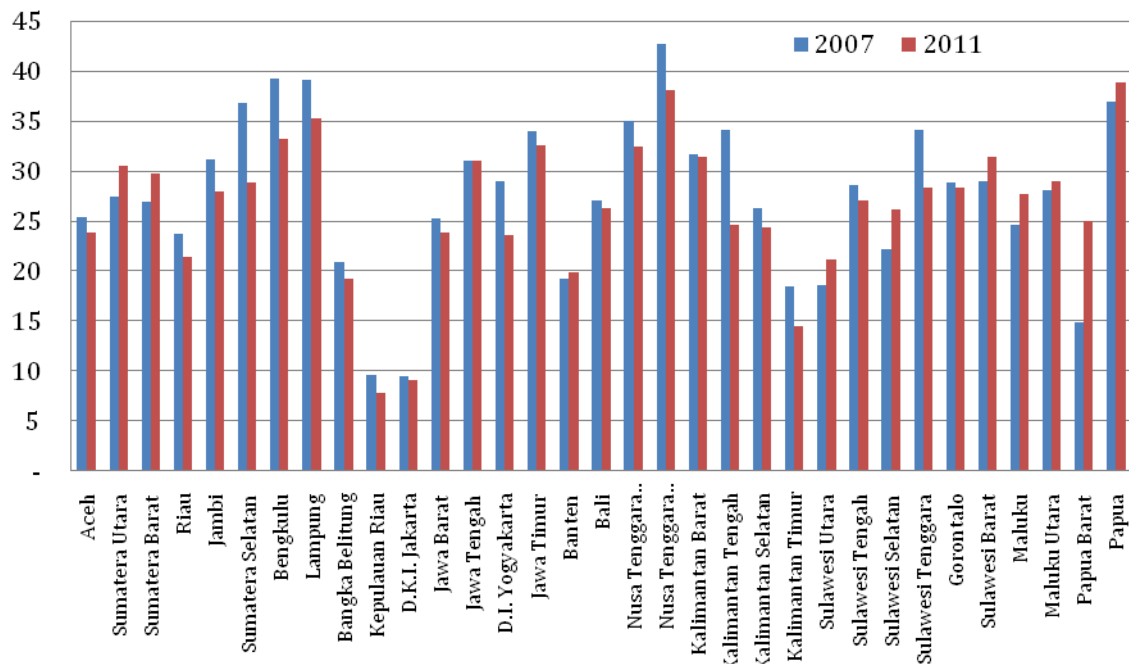
Sumber : BPS, 2013

Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk berproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan, peningkatan sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana investasi yang memadai.

3. Rendahnya Kualitas lapangan Kerja

Kualitas lapangan kerja ditunjukkan dari banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi. Porsi pekerjaan kurang berkualitas di Gorontalo menurun dari tahun 2007 ke 2011 namun masih termasuk tinggi secara nasional (Gambar 9). Pada tahun 2011 persentase pekerjaan kurang berkualitas di Gorontalo mencapai 27 persen. Kebijakan pembangunan sektor pertanian harus sejalan dengan kebijakan pembangunan di sektor industri karena rendahnya produktivitas pertanian. Pengembangan industri dapat diarahkan pada industri berbasis pertanian dalam arti luas, seperti agroindustri yang didukung oleh agrobisnis.

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

Sejalan dengan tingginya pekerjaan kurang berkualitas di Gorontalo, penurunan tingkat pengangguran juga melambat sejak tahun 2008. Hal ini mungkin berkaitan dengan melemahnya permintaan atas komoditas ekspor akibat krisis ekonomi dunia. Dalam PDRB menurut penggunaan, pertumbuhan ekspor sangat kecil, begitu pula dalam perannya sebagai sumber pertumbuhan. Melemahnya permintaan di pasar dunia di samping menurunkan volume ekspor juga biasanya diikuti oleh turunnya harga komoditas. Gorontalo belum berhasil mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan posisi geografis yang untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah perlunya mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian yang dapat menciptakan lapangan kerja alternatif dan lebih berkualitas serta memberikan nilai tambah dan pendapatan yang lebih besar.

4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Posisi Gorontalo terhubung dengan provinsi lainnya di Sulawesi oleh jaringan jalan lintas utama Pulau Sulawesi. Secara keseluruhan wilayah Gorontalo pada tahun 2012 dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 4.599 km. Tingkat kepadatan jalan di Gorontalo lebih tinggi daripada nasional dan dinilai masih relatif baik dibandingkan provinsi lain (Tabel 6). Tingkat kepadatan jalan merupakan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen.

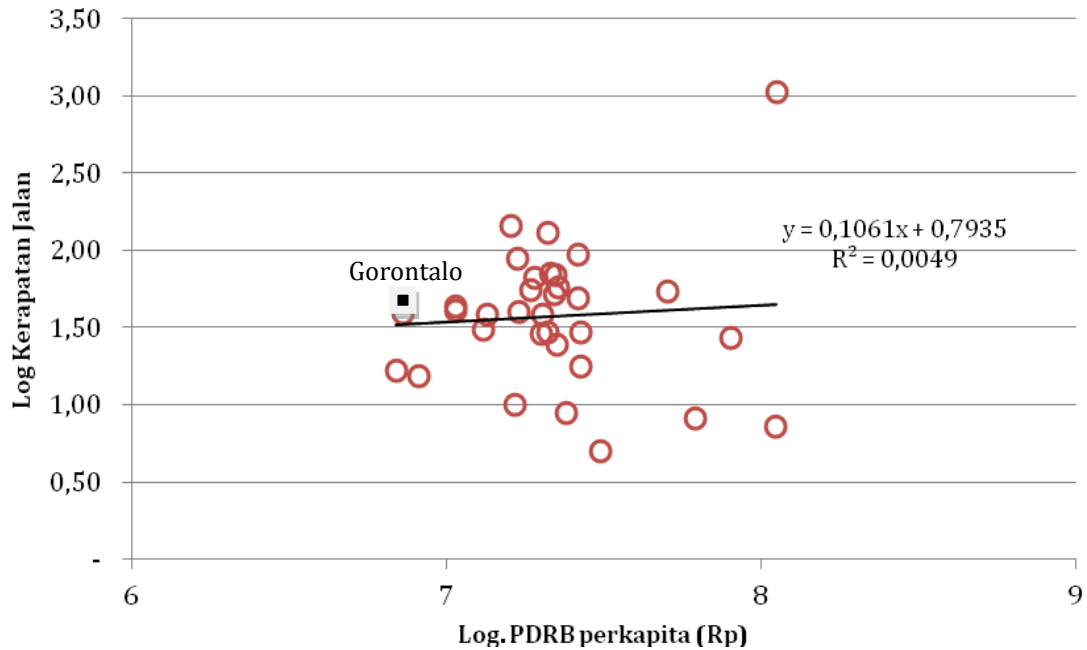
Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Tingkat defisiensi infrastruktur wilayah dianalisis dengan membandingkan pendapatan perkapita antarwilayah. Hal ini didasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian terlihat hubungan positif antara PDB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Gorontalo relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dengan demikian panjang jalan bukanlah masalah utama bagi Gorontalo.

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, kondisi jalan di Gorontalo relatif baik, ditunjukkan dari panjang jalan yang sudah beraspal di provinsi ini. Permukaan jalan beraspal di Gorontalo sudah mencapai 81 persen (Tabel 7), menunjukkan daya dukung jalan untuk pergerakan barang relatif baik.

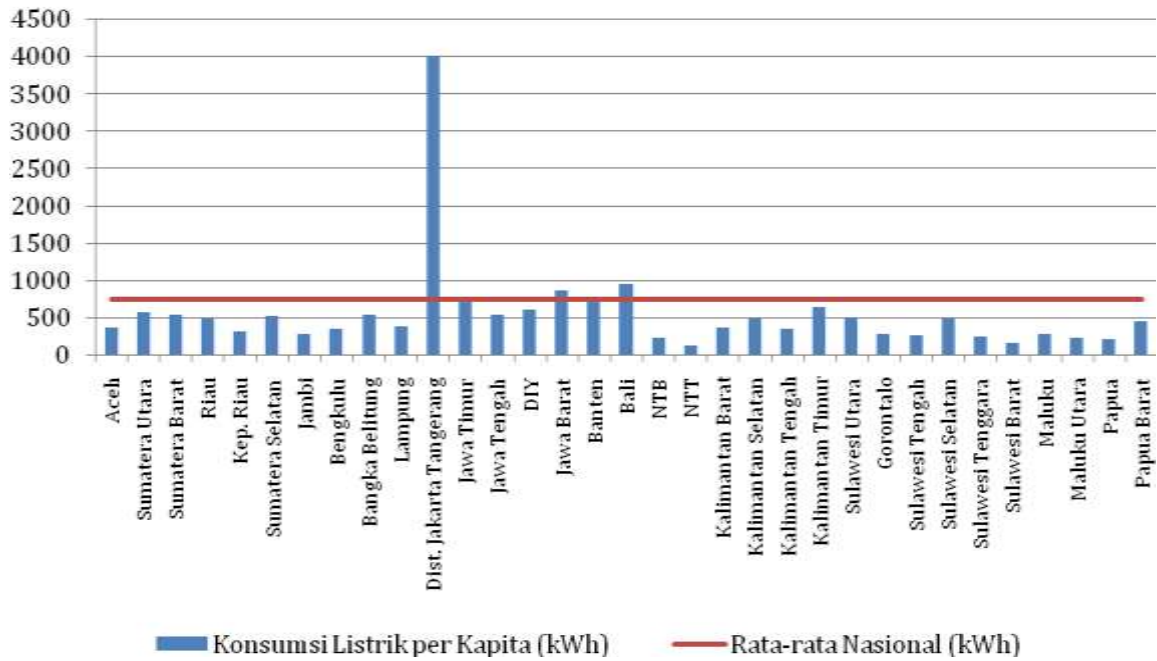
Tabel 7
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN									
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya		Total	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Gorontalo	334	82	45	11	29	7	0	0	408	100
Sulawesi	5.103	81	678	11	469	8	24	0	6.274	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2012

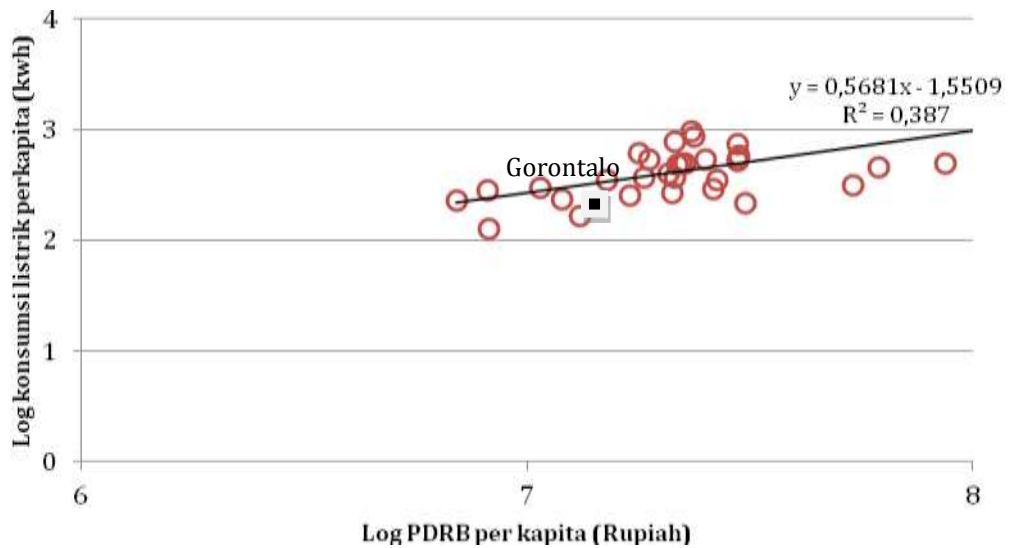
Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Gorontalo termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik.

Gambar 11.
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013



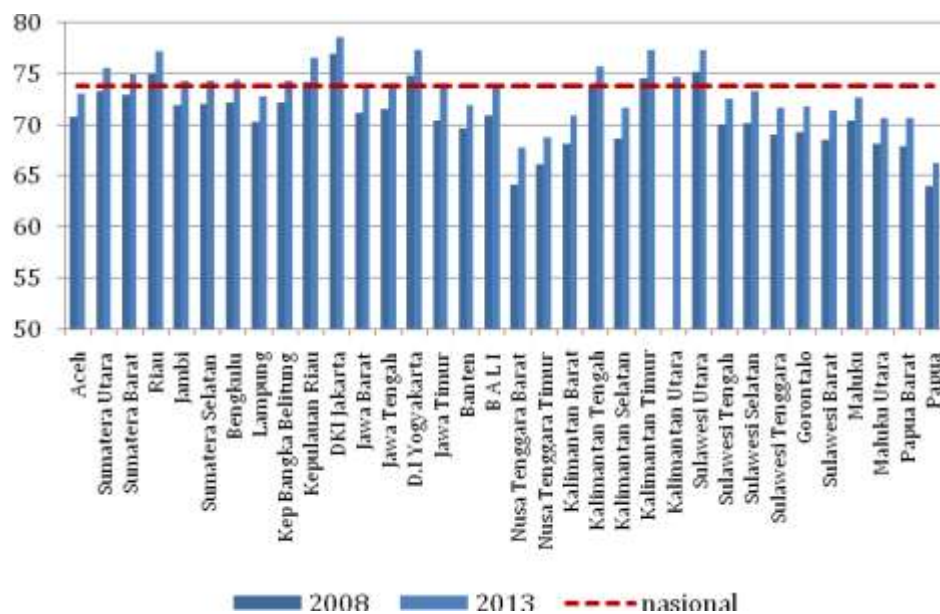
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

Gorontalo termasuk wilayah yang mengalami defisiensi infrastruktur listrik karena posisinya di bawah kurva linier. Hal ini menunjukkan konsumsi listrik Gorontalo jauh lebih rendah dari di provinsi lain di Indonesia. Dengan demikian, ketersediaan jaringan listrik merupakan salah satu masalah di Gorontalo. Untuk mewujudkan industrialisasi di wilayah ini pembangunan infrastruktur kelistrikan perlu mendapatkan perhatian khusus.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Gorontalo yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 walaupun masih di bawah IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13).

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

IPM Gorontalo belum baik capaiannya karena berada pada peringkat 25 secara nasional dengan nilai IPM sebesar 71,77 pada tahun 2013. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 66,20 tahun pada tahun 2008 menjadi 67,54 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Gorontalo meningkat dari 6,91 tahun pada 2008 menjadi 7,52 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Gorontalo pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 95,75 menjadi 96,87 persen, lebih tinggi dari capaian nasional 94,14 persen.

Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja di Gorontalo dengan ijazah minimal SMA meningkat

dari 22,91 persen pada tahun 2008 menjadi 28,88 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Hal ini menunjukkan Gorontalo belum mengalami perbaikan kualitas tenaga kerja karena rendahnya pendidikan angkatan kerja.

Tabel 8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 (Feb)	Perubahan
1	≤ SD	277.670	314.104	36.434
2	SMTP	53.342	56.192	2.850
3	SMTA Umum	72.777	93.958	21.181
5	Diploma I/II/III/Akademi	11.243	8.623	(2.620)
6	Universitas	14.352	47.766	33.414
Total		429.384	520.643	91.259

Sumber: BPS, 2014

6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi.

Rasio pinjaman terhadap simpanan di Gorontalo nilainya lebih besar dari satu dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan terbatasnya potensi simpanan masyarakat di Gorontalo, atau terdapat keterbatasan tabungan sebagai sumber modal masyarakat. Sebagai perbandingan, rasio pinjaman terhadap simpanan tahun 2013 untuk wilayah Sulawesi adalah 1,47 dan rasio untuk nasional adalah 0,92 (Tabel 9).

Tabel 9
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Gorontalo	2.911	7.929	2,73	0,84
Sulawesi	104.086	153.356	1,47	
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

Sumber: BPS, 2013

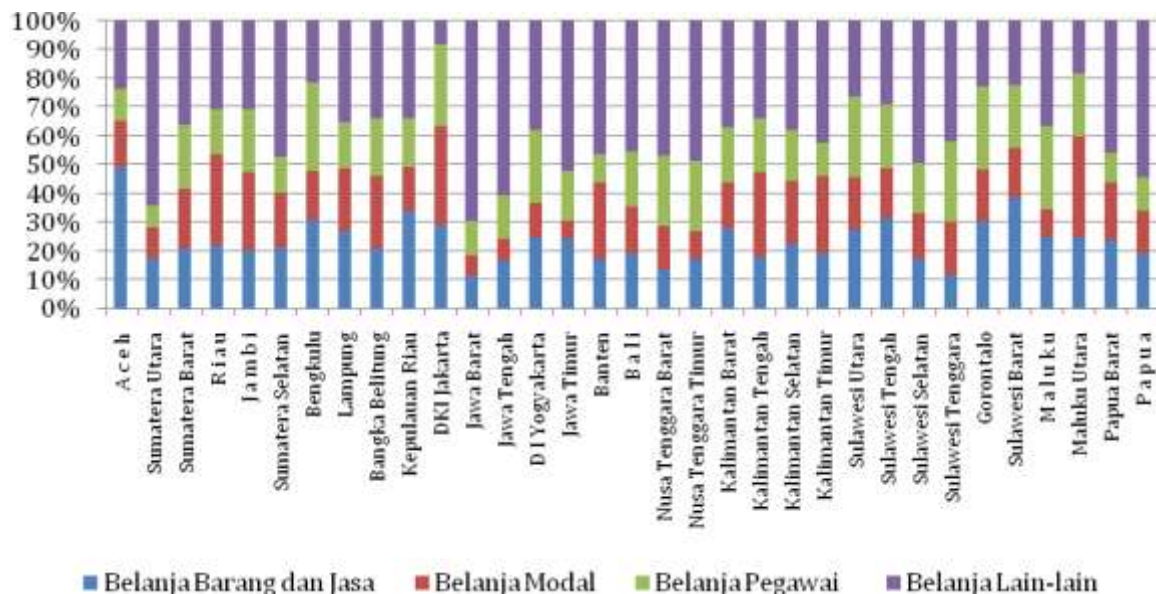
Rasio PMTB terhadap simpanan di Gorontalo nilainya kurang dari satu, menunjukkan potensi simpanan masyarakat masih memenuhi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Gorontalo bersifat konsumtif. Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat pada sektor produktif, selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat

7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Provinsi Gorontalo perlu meningkatkan kualitas komposisi anggarannya. Serapan belanja modal menunjukkan kinerja yang cukup rendah. Porsi belanja modal dalam total APBD Tahun 2013 Provinsi Gorontalo sebesar 17,67 persen (Gambar 14). Sementara itu, komposisi dari belanja barang dan jasa sebesar 30,71 persen, belanja pegawai sebesar 29,05 persen, dan belanja lain-lain sebesar 22,57 persen.

Belanja modal memiliki dampak langsung terhadap perekonomian sehingga perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini perlu lebih diarahkan pada belanja modal (komponen investasi). Investasi pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian karena merupakan perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Prospek pertumbuhan Provinsi Gorontalo tahun 2015 ditentukan oleh seberapa besar realisasi investasi di daerah. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi yang besar, baik investasi pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Provinsi Gorontalo terus mengalami perkembangan dinamis baik dari sisi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kehidupan sosial ekonomi di Gorontalo terus berkembang, yang diikuti oleh meningkatnya pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta meningkatnya pembangunan infrastruktur. Tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Gorontalo (indeks gini) selama periode 2008-2013 mengalami peningkatan dari angka 0,34 menjadi 0,44, lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,4 pada

tahun 2013. Kesenjangan output antarkabupaten/kota di Gorontalo tergolong rendah secara nasional, yang menciptakan suasana kondusif bagi penurunan kemiskinan, peningkatan kerukunan sosial, dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan.

Percepatan pengembangan ekonomi Sulawesi diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Provinsi Gorontalo dijadikan simpul pertanian dan pangan yang juga difungsikan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional. Posisi Gorontalo sangat dekat dengan Manado yang sekaligus merupakan akses terdekat Gorontalo terhadap pelabuhan dan perdagangan internasional. Selain proyek-proyek infrastruktur utama yang secara langsung melewati Gorontalo, proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan lainnya juga diperkirakan akan hanya memberi manfaat besar pada Gorontalo khususnya dalam membuka akses Gorontalo dengan Provinsi di Pulau besar lainnya. Namun demikian hal ini sangat bergantung pada aksesibilitas wilayah Gorontalo dan konektivitasnya dengan Makassar yang memiliki pelabuhan yang menghubungkan Sulawesi dengan pulau besar Indonesia lainnya.

Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja pembangunan, prospek pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Gorontalo dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 6,7 – 8,9 persen dapat tercapai. Di Kawasan Timur Indonesia kinerja ekonomi akan semakin membaik berkat meningkatnya produksi pertanian dan aktivitas pertambangan setelah diberlakukannya ijin ekspor mineral bagi parap penambang besar. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo telah meningkat pada akhir 2014 melebihi perkiraan sebelumnya. Gorontalo memiliki sumber daya alam melimpah yang berpotensi untuk terus meningkatkan PDRB di wilayah ini.
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 15,9 – 11,2 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo sebesar 17,51 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang tinggi di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Gorontalo harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 6,31 poin persentase atau 1,05 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Gorontalo akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Gorontalo maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan nilai tambahnya
- b. Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja berkualitas
- c. Peningkatan investasi di daerah dengan menggerakkan potensi masyarakat dan pemerintah yang masih besar.
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- f. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha
- g. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
2. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi *brand/citra* komoditas unggulan daerah;
3. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
4. Perbaikan kualitas jaringan jalan;
5. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
6. Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
7. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
8. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.

